
Perdamaian Sebagai Perwujudan Dalam Dialog Antar Agama

Aulia Agustin
UIN Sunan Ampel Surabaya
auliaagustin5@gmail.com

Abstract

Indonesia is a pluralistic country with a variety of ethnicities, races, cultures, languages and religions. Apart from being known as a pluralistic country, Indonesian people are also known to be very religious, and have made various efforts to create harmonious relations between religious communities. However, seeing the complex problems involving religious people in the current era is increasingly prevalent in this business as if in vain. Problems with a higher religion than religion that are no longer related to sadistic bandages, cruel, intolerant, even non-dialogical. Sam Harris, who is a new figure of atheism from the United States, also links this phenomenon and states that created religion creates conflict, division and social involvement. According to Sam, religion can support war, even religion is the core of the problem in the war. The war that was moved was justified because of religion, a religion that was often taken as a source of warfare. To realize the ideals of peace between religious communities, it is a significant effort to restore the nature of religion and the essential purpose of human life, dialogue is a form of effort. Dialogue with an inclusive dialogue model is a form of effort carried out in the present era. The strategy of implementing this dialogue model is one of the messages of religious peace in life, for the sake of religious and human safety. Interfaith dialogue is a form of support for each religious community and the support of the human race in racial struggle and struggle, conflict and inter-religious warfare. Dialogue The notion of interfaith is important as the goal of realizing a culture of peace and awareness will be responsible for virtue. Religious dialogue as a movement to call on all religious people to meet, make a strategy to build relationships between people on the basis of, compile, and coexist peacefully in different communities.

Keywords: plural societies, problems, inter-religious dialogue, peace

Abstrak

Indonesia merupakan sebuah negara majemuk dengan keanekaragaman mulai dari etnis, ras, budaya, bahasa, dan agama. Selain dikenal dengan negara majemuk, masyarakat Indonesia juga dikenal sangat religius, dan telah melakukan berbagai upaya agar terciptanya hubungan harmonis antara umat beragama. Namun ketika melihat problem kompleks yang dihadapi umat beragama di era sekarang ini semakin marak terjadi usaha ini seakan sia-sia. Problem dengan atas agama bahkan telah merubah wajah agama menjadi tidak religius lagi dengan balutan sadis, kejam, intoleran, bahkan non-dialogis. Sam Harris yang merupakan tokoh new-atheisme asal Amerika Serikat, juga mengaitkan fenomena ini dan menyatakan bahwa keberadaan agama justru menciptakan permusuhan, perpecahan dan ketegangan sosial. Menurut Sam, agama dapat memancing terjadinya peperangan, bahkan agama adalah inti dari masalah dalam peperangan tersebut. Peperangan yang terjadi seringkali dijustifikasi bersumber karena agama, agama sering dijadikan sumber

peperangan. Untuk mewujudkan cita-cita perdamaian antar umat beragama itu sebagai sebuah upaya signifikan untuk mengembalikan hakikat agama dan tujuan hakiki kehidupan manusia, dialog merupakan bentuk salah satu upaya. Dialog dengan model dialog inklusif merupakan bentuk upaya yang pas dilakukan di era sekarang. Strategi implementasi model dialog ini menjadi salah satu pesan perdamaian agama dalam kehidupan, demi keselamatan agama dan manusia. Dialog antar agama sebagai gagasan merupakan bentuk dukungan bagi keimanan masing-masing umat beragama dan dukungan persaudaran umat manusia dalam menghadapi rasialisme serta menghadapi tantangan, konflik serta peperangan antar agama. Gagasan dialog antar agama penting sebagai upaya mewujudkan budaya damai dan kesadaran akan tanggungjawab kemanusiaan. Dialog agama sebagai gerakan untuk menyerukan pada semua umat beragama untuk berhimpun, menciptakan strategi membangun hubungan antar manusia atas dasar keadilan, toleransi, dan hidup berdampingan secara damai dalam komunitas yang berbeda.

Kata Kunci: masyarakat majemuk, problem, dialog antar umat beragama, perdamaian.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki populasi masyarakat banyak dengan beraneka macam suku etnis, ras, budaya, bahasa, dan agama. Kemajemukan ini hidup dalam satu negara kepulauan Indonesia yang melintang dari Sabang hingga Merauke. Dengan banyaknya penduduk lebih dari 300 kelompok etnis di Indonesia dengan beraneka macam kemajemukan ini maka terdapat kemungkinan-kemungkinan timbul konflik dapat terjadi. Indonesia sebagai negara dengan sebuah bangsa yang terbangun di atas struktur masyarakat yang plural tak jarang konflik atas dasar agama pun sering kita jumpai.

Dalam pembukaan UUD 45 pasal 29 ayat 2 berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap individu untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam aturan ini Indonesia telah membebaskan bangsanya untuk memeluk agamanya masing-masing yang diyakini sesuai agama resmi yang dilegalkan di Indonesia. Tidak ada bentuk paksaan dalam beragama di seluruh lapisan masyarakat. Keadilan Tuhan nyata diberikan kepada manusia dengan menjunjung tinggi nilai, harkat dan martabat kemanusiaannya.¹⁷

Banyaknya penduduk di Indonesia yang menganut berbagai agama serta dorongan masalah kompleks mayoritas dan minoritas membawa persoalan hubungan antar penganut agama.¹⁸ Hubungan antar penganut berbagai agama dan pergaulan masyarakat penganut antar agama dalam kalangan minoritas dan mayoritas juga dapat menggejala dalam berbagai bentuk ketegangan. Bentuk ketegangan dalam kelompok mayoritas yaitu timbulnya perasaan tidak puas karena merasa terdesak posisi dan peranannya baik dari segi politik atau ekonomi. Sedangkan di kalangan minoritas bentuk ketegangannya yaitu mengalami ketakutan karena merasa terancam eksistensi dan hak-hak asasinya.¹⁹

¹⁷ Husna Amin, “Mewujudkan Perdamaian Agama Dalam Bingkai Dialog”, *LAIN Ar-Raniry*, 2013, <https://www.academia.edu/15830768/>, 4

¹⁸ Djohan Effendi, *Dialog Antar-Agama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan dalam Agama dan Tantangan Zaman, Pilihan Artikel Prisma 1975-1984* (LP3ES: Jakarta, 1985), 170

¹⁹ Luluk Fikri Zuhriyah, “Dakwah Inklusif Nurcholish Madjid”, *Jurnal Komunikasi Islam*, Volume 02, Nomor 02, Desember 2012, Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 220

Bentuk ketegangan yang dialami dalam hubungan antarumat beragama berpangkal kepada pemikiran dan sikap dari setiap diri masing-masing penganut yang telah tertanam. Dalam menciptakan sikap pandangan inklusif dalam masyarakat dibutuhkan banyak faktor di dalamnya, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hidup berdampingan dalam satu wilayah secara damai dalam kehidupan sosial umat beragama di Indonesia merupakan salah satu bentuk penerimaan pemikiran dari pandangan inklusif.²⁰

Ketenangan, keamanan, keselamatan, ketentraman, kerukunan, keterlindungan, keharmonisan, dan kedamaian merupakan cita-cita dalam lintas agama, etnis, dan ras keinginan semua masyarakat. Jika variasi keragaman ini mampu dipimpin, diorganisasi serta dikoordinasi lewat wadah atau forum yang tersistem dengan kebijakan negara, ini menjadi kekayaan budaya luar biasa Indonesia dan menjadi jendela cermin dunia tentang keberagaman. Sebaliknya manakala jika letupan kasus-kasus kecil keberagaman atau aspek lain yang dapat ditafsirkan dapat dikaitkan dengan pengabaian spiritual keberagaman, tidak diatasi dengan serius akan menjadi ledakan perpecahan dahsyat yang akan melemahkan negara.²¹

Rasa sepenanggungan, kesetiakawanan, dan kebersamaan menjadi “barang mahal” di tengah pesan negatif globalisasi dan pemahaman sempit atas kapitalisme. Jika barang mahal ini hanyut tanpa adanya *reserve* oleh masyarakat maka hal ini dapat memicu munculnya kesenjangan sosial. Solusi bijak yang perlu dikedepankan adalah pemahaman dari diri untuk diri bahwa kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak akan mampu ‘sendiri’, tetapi membutuhkan empati dan simpati pihak lain meski beda agama.²²

Dialog umat beragama bukan sekadar usaha menyelesaikan konflik yang ada, melainkan usaha untuk membangun suatu masyarakat yang mudah bergaul tanpa ada rasa kecemburuan bahkan rasa saling membenci terhadap perbedaan ras, etnis, dan agama keyakinan dengan penuh kasih dan bernalar. Masyarakat diharapkan dapat belajar memahami perbedaan-perbedaan yang ada bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sesuatu yang “wajar” dan “normal”.²³

Perdamaian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perdamaian diartikan sebagai penghentian permusuhan (perselisihan); perihal damai.²⁴ Dengan kata lain, perdamaian berarti dapat hidup berdampingan tanpa adanya rasa permusuhan dari satu kelompok dengan kelompok lainnya. Perdamaian juga dapat diartikan suatu proses yang dinamis yang harus memperhitungkan keragaman keadaan dan unsur yang dapat membantu atau malahan mengganggunya.²⁵

Menurut Alfred Noerth Whitehead, damai merupakan bentuk upaya membentuk suatu tatanan keselarasan dari aneka ragam keselarasan yang dipadukan secara bersama dengan empat unsur lainnya yaitu kebenaran, keindahan, seni, dan petualangan, sehingga

²⁰ Ibid., 220

²¹ Mukhibat, “Konstruksi Harmoni Keberagaman Masyarakat Pedesaan Berbasis Masjid”, *Proceeding of Community Development*, Vol. 1 (2017), 46

²² Moh Rosyid, “Harmoni Kehidupan Sosial Beda Agama dan Aliran di Kudus”, *ADDIN*, Vol. 7, No. 1, Februari 2013, 54

²³ Mukhibat, “Konstruksi Harmoni Keberagaman Masyarakat Pedesaan Berbasis Masjid”, 51

²⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perdamaian>, diakses pada tanggal 15 Desember 2018

²⁵ Raimondus Arwalembun, Dialog Antaragama: Jalan Menuju Perdamaian Dunia (Sebuah Tinjauan Atas Pemikiran Alfred North Whitehead), http://www.academia.edu/33635743/Dialog_Antaragama_Jalan_Menuju_Perdamaian_Dunia, diakses pada 14 Desember 2018 pukul 20:55, 2

menyingkirkan dari tentang peradaban, egoisme yang resah, yang dalam kenyataannya telah menandai upaya perwujudannya.²⁶ Menurutnya, *peace* atau rasa damai yang merupakan tuntutan untuk suatu masyarakat yang beradab dapat ditunjang oleh kehidupan beragama.²⁷ Artinya, rasa damai yang menjadi keinginan dan harapan bagi umat manusia ini dapat dirasakan melalui agama.

Perdamaian akan dapat terjadi jika terciptanya bentuk kerukunan dalam masyarakat majemuk. Bentuk kerukunan dapat mencakup rukun dalam multietnis, multiagama, dan sebagainya. Kerukunan dalam multiagama dibentuk melalui hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat.²⁸ Konsep Pluralisme sebagai sebuah ajaran yang mengajarkan keberagaman dalam berkeyakinan, menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama sudah semestinya menjadi pemahaman orang-orang beragama. Dengan tujuan terciptanya keharmonisan, ketenteraman dalam realitas sosial yang penuh dengan keberagaman untuk mewujudkan negara yang damai.²⁹

Dialog Antar Agama

Dialog antaragama merupakan dialog yang dijalankan oleh umat berbeda agama dengan lebih terorganisir dan secara langsung atau tidak langsung menyangkut institusi agama.³⁰ Dialog tidak hanya menyangkut mengenai persoalan iman, tetapi dialog juga melibatkan institusi sosial. Hal ini karena agama lebih terkait dengan komunitas beriman yang berinstitusi. Dalam realitas sosial, agama memiliki kecenderungan pada hal positif dan juga negatif.³¹ Menurut Howe Reuel L, dalam buku yang ditulis oleh M. Zainussin, dialog diibaratkan seperti darah dengan tubuh. Apabila darah berhenti mengalir, maka tubuh tidak akan berfungsi dan mati.³²

Martin Forward, mendefinisikan kembali pengertian yang telah dirumuskan oleh Dewan Gereja Sedunia (World Council of Churches/WCC) pada tahun 1971:

Dialog dimulai saat orang-orang bertemu. Dialog bergantung pada pengertian timbal balik dan kepercayaan timbal balik. Melalui dialoglah dimungkinkan berbagi dalam melayani. Dialog menjadi medium untuk kesaksian yang otentik.³³

Dialog antara agama akan memunculkan lagi bentuk dialog beraneka macam yang dirujuk sebagai dialog peradaban, dialog kehidupan, dialog tindakan atau perlakuan dan seumpama dialog antara agama semakin meluas dibudayakan dalam kalangan penganut

²⁶ Whitehead Alfred North, *Adventures of Ideas* (New York: The New American Library, 1958), 283

²⁷ J. Sudarminta, *Filsafat Proses: Sebuah Pengantar Sistematis filsafat Alfred North Whitehead* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 98-99

²⁸ Darwis Muhdina, "Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Makassar", *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 3 Nomor 1 (2015), 20

²⁹ *Ibid.*, 21

³⁰ J. B. Banawiratma dan Zainal Abidin Baqir. etc, *Dialog Antar Agama* (Bandung: Mizan, 2010), 6

³¹ *Ibid.*, 7

³² M. Zainuddin, *Pluralisme Agama Pergulatan Dialogis Islam-Kristen Di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 65

³³ Martin Forward, view point in dialogue, dalam *A Short Introduction To Interreligious Dialogue* (Oxford: Oneward, 2001)

beragama maka hal ini akan menciptakan sebuah kehidupan beragama yang harmonis.³⁴ Mukti Ali juga menjelaskan bagaimana pentingnya dialog dalam kehidupan yang dapat menciptakan kedamaian, dalam ungkapannya:

“Dialog antar agama adalah pertemuan hati dan pikiran antar pemeluk pelbagai agama. Ia merupakan perjumpaan antar pemeluk agama, tanpa merasa rendah dan tanpa agenda atau tujuan yang dirahasiakan.”³⁵

Sehingga dapat dipahami, bahwasannya dialog antar agama adalah dialog yang dilakukan secara terbuka dan penuh simpati, sehingga peserta dialog masing-masing berusaha untuk memahami posisi peserta dialog lain secara tepat dan proporsional, serta berusaha memandangnya dari perspektif mereka yang dipahami.³⁶

M. Zainuddin memaparkan dalam buku milik Banawiratma, etc mengenai tujuan dialog, bahwa tujuan dialog adalah terwujudnya landasan humanisme umum; memodernisir kedua agama (Islam-Kristen) pada satu titik pusat sasaran, yakni peran dan arti agama; meningkatkan keimanan; membangun dialektika yang berciri pluralisme, tidak hanya bersifat teoretis, tetapi dialog kehidupan yang bersifat praktis.³⁷ Tujuan lain dilakukannya dialog adalah memecahkan persoalan yang terjadi dalam kehidupan beragama, sehingga agama dapat hidup berdampingan secara damai.³⁸

Menurut Mukti Ali memaparkan dalam buku dialog antar umat beragama dijalankan oleh para pengajar, bukan para politisi, hal ini dianggap lebih membuahkan hasil daripada menjalankan secara formal pada tatanan pemerintahan.³⁹ Dialog antarumat beragama, khususnya di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1970-an, mulai dari tingkat nasional hingga internasional. Sebagian besar diprakarsai oleh proyek pengembangan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Departemen Agama.⁴⁰ Melalui dialog inklusif dapat menghadirkan Tuhan dalam dunia, karena dalam dialog inklusif manusia saling membuka diri, sekaligus membuka diri kepada Tuhan. Apabila manusia telah membuka diri kepada Tuhan, maka disanalah ditemukan hakikat serta keajaiban dialog.⁴¹

Menurut Nurcholish Madjid, dalam dialog ini terdapat berbagai sikap. *Pertama*, sikap yang *eksklusif* dalam melihat agama lain. Dalam golongan sikap ini beranggapan bahwa agama-agama lain adalah jalan yang salah, yang menyesatkan bagi para pengikutnya. *Kedua*, sikap *inklusif* yang beranggapan bahwa agama-agama lain adalah bentuk implisit agama kita. *Ketiga*, sikap *pluralis* yang bisa terekspressi dalam macam-macam rumusan, misalnya: “Agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai Kebenaran yang sama”.⁴²

³⁴ Khadijah Mohd Khambali Nurhanisah Senin, “Citra Dialog Antara Agama dalam Perspektif Islam dan Kristian: Analisis Awal”, MALIM – SEA Journal of General Studies 13, (2012), 170

³⁵ A. Mukti Ali, “Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi”, dalam *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda*, ed. Burhanuddin Daya dan Herman Leonard Beck (Jakarta: INIS, 1992) 208-211

³⁶ Luluk Fikri Zuhriyah, “Dakwah Inklusif Nurcholish Madjid”, 237

³⁷ M. Zainuddin, *Pluralisme Agama Pergulatan Dialogis Islam-Kristen Di Indonesia*, 59-60

³⁸ Husna Amin, “Mewujudkan Perdamaian Agama Dalam Bingkai Dialog”, 7

³⁹ J. B. Banawiratma dan Zainal Abidin Baqir. etc, *Dialog Antar Agama*, 5

⁴⁰ Muhammad Sabri, *Filsafat Perennial: Perspektif Alternatif bagi Studi Agama dan Signifikansinya terhadap Kehidupan Beragama Di Indonesia*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalidjaga, 1997), hal. 132.

³ Amin Abdullah, “Etika dan Dialog Antar Agama: Perspektif Islam”, *Jurnal Ulumul Qur’an*, No. 4 Vol IV. (1996), 2-3

⁴¹ M. Zainuddin, *Pluralisme Agama Pergulatan Dialogis Islam-Kristen Di Indonesia*, 65

⁴² Luluk Fikri Zuhriyah, “Dakwah Inklusif Nurcholish Madjid”, 235

Sikap inklusif biasanya dilawankan dengan sikap eksklusif dan dipertemukan dengan sikap pluralis dalam beragama. Sikap eksklusif adalah sikap yang secara tradisional telah sangat berpengaruh dan mengakar dalam masyarakat Muslim hingga saat ini, yang menganggap bahwa Islam adalah satu-satunya jalan kebenaran dan keselamatan. Sedangkan sikap inklusif adalah sikap yang memandang bahwa Islam adalah agama yang mengisi dan menyempurnakan berbagai jalan yang lain. Semetara sikap pluralis adalah sikap yang memandang bahwa setiap agama mempunyai jalannya sendiri, yang sama absah, untuk mencapai keselamatan.⁴³ Ketiga istilah ini terkait erat dengan perdamaian agama.

Menciptakan sikap inklusif sebagai cara pandang terhadap perbedaan itulah akan dapat ditumbuhkan sikap-sikap pluralistik di antara agama. Dengan adanya kesadaran yang positif tentang adanya perbedaan-perbedaan antara berbagai kelompok untuk lebih memahami sejarah dalam kerangka yang sedemikian itu untuk secara serius mempertimbangkan kesadaran-diri dari setiap komunitas dan keragaman dari keseluruhannya. Ini berarti bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan dialog yang terus menerus antar berbagai agama.⁴⁴

Hans Kung menyatakan bahwa dialog inklusif menurutnya adalah bahwa setiap orang beragama harus membuktikan keimanannya masing-masing, terlepas dari semua perbedaan yang ada. Setiap umat beragama harus bertanggung jawab terhadap Tuhan dan melayani masyarakat manusia dengan penuh penghormatan satu sama lain. Dialog antar umat beragama benar-benar dapat menimbulkan pemahaman dan pencerahan kepada umat dalam wadah kerukunan hidup antar umat beragama. Dalam dialog inklusif diperlukan sikap saling terbuka antar pemeluk agama.⁴⁵

Namun hal ini juga ditambahkan oleh Mudji Sutrisno yang menegaskan bahwa untuk membangun dialog antar umat beragama tidaklah cukup hanya dengan dialog logika rasional, tetapi perlu logika psikis, serta upaya dialog teologi kerukunan juga harus dibarengi dengan pencarian-pencarian psikologis, seperti rasa saling curiga yang selama ini selalu muncul, dan ini baru dapat dilakukan oleh orang yang inklusif dalam beragama, karena sikap eksklusivisme terus berusaha agar orang lain mengikuti agamanya dengan menganggap agama lain keliru dan tidak mempunyai keselamatan.⁴⁶

Menurut Amin Abdullah, ukuran keberhasilan yang ditunjukkan sebagai tanda-tanda positif dari aktivitas dialog yang inklusif adalah meredanya isu pertikaian antar umat beragama di tanah air, meskipun tidak bisa dikatakan hilang sama sekali. Di samping itu munculnya konsep ideologi kerukunan yang disebut sebagai Trilogi Kerukunan: (1) Kerukunan Antar Inter Umat Beragama, (2) Kerukunan Antar Umat Beragama, dan (3) Kerukunan Antar Pemerintah dan Umat Beragama.

Label Agama Sebagai Pemicu Konflik

Semenjak maraknya kekerasan berwajah agama, gambar Indonesia dengan kemajemukan agama yang hidup rukun berdampingan secara harmonis telah rusak. Ketika reformasi muncul bersama dengan nilai-nilai demokratis, keterbukaan dan kebebasan yang melekat pada nilai itu telah disalah artikan oleh sebahagian orang. Keterbukaan untuk menyatakan pendapat didistorsi menjadi kebebasan memfitnah dan menyerang orang lain. Kebebasan mengeluarkan aspirasi dan ekspresi mengalami pembiasaan menjadi perilaku anarkhis yang sewenang-wenang. Akibatnya, kebebasan bagi yang satu menjadi ancaman

⁴³ Budi Munawar Rahman, *Argumen Islam untuk Pluralisem: Islam Progressif dan Perkembangan Diskursusnya* (Jakarta: Gramedia, 2010), 23-24

⁴⁴ Luluk Fikri Zuhriyah, "Dakwah Inklusif Nurcholish Madjid", 236

⁴⁵ Hans Kung, *Islam, Past, Present and Future* (England: One World Publication, 2007), 504

⁴⁶ Hans Kung, *Islam, Past, Present and Future*, 507

bagi yang lain. Bagi pihak yang terancam merasa bebas untuk membalas, sehingga terjadilah konflik berkepanjangan, baik bersifat horizontal maupun (semi) vertikal. Ironisnya, agama ikut berperan menciptakan dan mengembangkan anarkisme dan konflik tersebut. Sebahagian orang atau kelompok menjadikan agama sebagai justifikasi untuk menyerang kelompok lain yang tidak sehalus atau tidak seagama.⁴⁷ Dengan menggunakan label agama, konflik dan kerusuhan atau api permusuhan semakin mudah berkobar dan merambah ke mana-mana.⁴⁸

Abd A'la dalam bukunya menuliskan bagaimana Azra mengungkapkan akar berbagai konflik yang bermula pada rasa frustrasi, alienasi, serta derivasi ekonomi dan politik. Situasi politik yang berkembang menumbuhkan kekecawaan dan kemarahan yang siap meledak setiap saat menjadi kekerasan politik. Pada kondisi ini, agama menjadi pemicu paling mudah dan efektif sebagai alat pemersatu dalam mengarahkan massa untuk melakukan kekerasan yang dibungkus dengan label agama. Pada saat yang sama hukum sulit ditegakkan. Akibatnya, proses pengadilan hukum terhadap pelaku kekerasan bersifat setengah hati.⁴⁹

Kondisi ini semakin diperburuk oleh sebagian elit politik yang kini duduk di lembaga tinggi Negara yang membuat situasi kehidupan semakin memanas melalui pernyataan-pernyataan yang justru membuat masyarakat semakin marah, seakan-akan tidak lagi tersisa sikap dan perilaku mereka yang mengarah untuk penyelesaian masalah, selain sikap mengumpulkan kekuatan untuk saling rebut pengaruh. Selama egoisme, ambisi, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan semua interes di luar kepentingan rakyat dan bangsa, maka segala upaya dari pihak manapun termasuk pemerintah tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan dengan tuntas, bahkan bangsa terus terpuruk dalam krisis yang lebih parah. Dengan demikian, perlu upaya serius dan intens serta menyeluruh agar dapat menyelesaikan persoalan secara tuntas.⁵⁰

Kompleksitas persoalan yang muncul terkait dengan isu keagamaan akhir-akhir ini, semakin mendorong para intelektual dan praktisi pendidikan untuk memikirkan tentang agama, sehingga tak heran banyak sekali muncul pengamat agama dan masalahnya, baik di kalangan agamawan, budayawan, sosiolog, maupun akademisi. Salah satu faktor ketidakmampuan agama dalam memberikan landasan bagi penciptaan kehidupan yang damai dan sejahtera terletak pada mandulnya teologi dalam menangkap perkembangan realitas kehidupan.⁵¹

Di Indonesia, seringkali masalah yang berlabel berujung pada kekerasan. Seperti dalam laporan yang dikeluarkan oleh program studi agama dan lintas budaya (CRCS), UGM dalam dua laporan tahunan kehidupan beragama di Indonesia pada tahun 2008 dan 2009. Selain itu persoalan menyangkut rumah ibadah, misalnya, masih menjadi ganjalan serius dalam hubungan antarkomunitas agama, khususnya Kristiani dengan Muslim. Jenis ketegangan lain yaitu yang menyangkut meningkatnya wacana penyesatan, dan dalam beberapa kasus juga berakhir dengan kekerasan. Pada 2009 saja, *Laporan Tahunan CRCS* mencatat 25 kasus penyesatan dan 11 kasus lain khusus menyangkut pengikut Ahmadiyah. SKB yang dikeluarkan Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung pada Juni 2008 mengenai Ahmadiyah tidak menyelesaikan masalah, malahan mungkin memberi

⁴⁷ Husna Amin, "Mewujudkan Perdamaian Agama Dalam Bingkai Dialog", 4

⁴⁸ Abd A'la, *Melampai Dialog Agama* (Jakarta: Kompas, 2002), 11-12

⁴⁹ Abd A'la, *Melampai Dialog Agama*, 23-24

⁵⁰ Husna Amin, "Mewujudkan Perdamaian Agama Dalam Bingkai Dialog", 5

⁵¹ *Ibid.*, 13

justifikasi terhadap tindak kekerasan oleh beberapa kelompok masyarakat atas para pengikut Ahmadiyah.⁵²

Khutbah-khutbah agama yang disampaikan dalam tempat ibadah seperti di masjid, vihara, gereja ataupun pura yang berupa pemaparan dogma-dogma yang kaku dan parsial, mengakibatkan umatnya menjadi sangat parsial. Khutbah atau ajaran agama akan lebih bermanfaat jika diarahkan pada pemahaman dan perolehan ilmu pengetahuan tentang hakikat nilai yang terkandung dalam agama dan dimensi spiritualitas agama yang tertanam dalam diri manusia sebagai fitrah kemanusiaan yang melandasi iman. Ajaran agama yang bersifat dogmatik bukan hanya membuat ilmu agama dan daya pikir umatnya tumpul, namun berpeluang terjadinya claim-claim dan justifikasi yang menuai konflik antar umat beragama dan merusak harmonisasi kehidupan yang kini sudah mulai terjalin dengan baik.⁵³

Sikap eksklusif dalam agama memang perlu untuk memelihara keimanan masing-masing umat beragama, tapi terkadang di digunakan untuk menghakimi agama lain. Masing-masing umat beragama memiliki landasan iman yang berbeda, dan berhak mempertahankan kebenaran agama mereka. Klaim pembenaran agama hanya berlaku untuk agama masing-masing, tetapi tidak dapat dibenarkan jika klaim pembenaran ini digunakan untuk menghakimi kebenaran atau menganggap salah kebenaran yang diakui agama lain.⁵⁴

Dialog Antar Agama Sebagai Tawaran Perdamaian

Dalam mencapai cita-cita menuju perdamaian di tengah arus globalisasi yang sedang dihadapi umat beragama saat ini. Segala bentuk arus perubahan mengakibatkan dampak yang dapat mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Ketika beberapa orang meragukan peran agama dalam menciptakan perdamaian, dan bahkan menuduh agama sebagai sumber peperangan, sejumlah orang justru ingin membuktikan bahwa agama adalah sumber perdamaian.⁵⁵ Dilihat dari masyarakat Indonesia yang majemuk, terkait dengan hubungan antarumat beragama, maka dialog merupakan salah satu jalan yang baik. Terdapat pengakuan positif dari Nurcholish Madjid mengenai adanya keanekaragaman, yaitu suatu sikap yang dimulai dengan mengakui secara kenyataan bahwa kita hidup dalam keadaan masyarakat yang heterogen. Keadaan bermacam-macam ini yang menciptakan hal baik, positif dan sangat berguna.

Nurcholish Madjid mengungkapkan, jikalau suatu dialog antar kelompok dilakukan, hasilnya biasanya akan lebih baik. Sehingga dari sinilah dakwah inklusif memiliki signifikansi yang jelas dan sangat berpengaruh dalam menciptakan perdamaian di tengah masyarakat yang majemuk.⁵⁶ Nurcholis Madjid sebagai tokoh pembaharuan dan cendekiawan muslim, beliau mendukung konsep pluralisme dengan mengakomodasikan keberagaman dan kebhinekaan keyakinan oleh penganut umat beragama di Indonesia. Dakwah inklusif, sebagai salah satu langkah agar diharapkan problematika yang mendera bangsa Indonesia khususnya hubungan antar agama atau hubungan antarumat beragama yang terus beramasalah dapat diminimalisir.⁵⁷

Dalam buku milik Muinim Sirry dipaparkan untuk menciptakan perdamaian di antara pemeluk agama terdapat beberapa macam bentuk dialog yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. *Pertama*, dialog parlementer (*parliamentary dialogue*), yakni dialog yang di

⁵² J. B. Banawiratma dan Zainal Abidin Baqir. etc, *Dialog Antar Agama*, 15

⁵³ Husna Amin, "Mewujudkan Perdamaian Agama Dalam Bingkai Dialog", 10

⁵⁴ Ibid., 13

⁵⁵ Akhmad Rizqon Khamami, "Dialog Antar-Iman Sebagai Resolusi Konflik, Tawaran Mohammed Abu-Nimer", *Al-Tabrir*, Vol. 14, No. 2 Mei 2014, 250

⁵⁶ Luluk Fikri Zuhriyah, "Dakwah Inklusif Nurcholish Madjid", 234

⁵⁷ Ibid., 233

dalamnya melibatkan ratusan peserta, seperti dialog pada 1983 di Chicago dalam *Worlds Parliament of Religions*. *Kedua*, dialog kelembagaan (*institutional dialogue*), yakni dialog di antara wakil-wakil institusional berbagai organisasi agama. Dialog kelembagaan ini terkadang melibatkan majelis-majelis agama yang diakui pemerintah, seperti MUI, PGI, KWI, Walubi, dan lainnya. *Ketiga*, dialog teologi (*theological dialogue*). Dialog teologi ini mencakup pertemuan yang membahas persoalan-persoalan teologis dan filosofis. *Kempat*, dialog dalam masyarakat (*dialogue in community*) atau dialog kehidupan (*dialogue in life*), dialog-dialog dalam kategori ini pada umumnya condong kepada penyelesaian yang bersifat “hal-hal praktis” dan “aktual” dalam kehidupan yang menjadi perhatian bersama. *Kelima*, dialog kerohanian (*spiritual dialogue*), dialog yang dilakukan sebagai ujian untuk menyuburkan dan memperdalam kehidupan spiritual di antara berbagai agama. Bentuk dialog spiritual yang mungkin lebih akseptabel adalah melalui aspek esoteris agama, seperti ditawarkan oleh Frithjof Schuon, dan Seyyed Hossein Nasr melalui filsafat perennialnya.⁵⁸

Dari banyaknya bentuk macam dialog, Nurcholish Madjid lebih condong pada dialog teologis untuk di gunakan sebagai langkah dalam membangun masyarakat yang rukun agar tercipta satu perdamaian. Dalam ungkapan Nurcholish Madjid tujuan dalam suatu dialog antar agama adalah kesalingpahaman. Maksudnya adalah mengkomunikasikan pandangan-pandangan masing-masing dalam rangka menjembatani ketidaktahuan dan kesalahpahaman antara satu dan lain agama. Dalam aplikasinya, dialog ini lebih membiarkan setiap penganut agama mengungkapkan pandangan teologis mereka dengan bahasa mereka sendiri.⁵⁹

Bagi Abu-Nimer, dialog antar-iman merupakan sarana untuk menciptakan perdamaian di dunia. Menurut Abu-Nimer, dengan adanya dialog, manusia dapat terhindarkan dari masalah yang dapat memunculkan permusuhan dan kekerasan. Dengan meminjam teori pluralisme yang kemudian dikaitkan dengan pemikiran Abu-Nimer maka akan masuk dalam kategori pluralisme komunikatif yang menggabungkan kubu partikularis dan kubu universalis.⁶⁰

Seperti dalam ungkapan Hans Kung dalam salah satu karya yang berjudul “*Is Dialogue Impossible*”, Hans Kung menawarkan tiga hipotesis tentang peran agama bagi masa depan dunia. *Pertama*, tidak ada masa depan dunia tanpa suatu etika global atau *no survival without a world ethic*. *Kedua*, tidak ada perdamaian dunia tanpa perdamaian antar agama (*no world peace without religious peace*), dan *ketiga*, tidak ada perdamaian antar agama tanpa dialog antar agama (*no religious peace without religious dialogue*). Kung juga memetakan empat strategi orang terhadap agama orang lain yaitu pertama, strategi benteng yang menilai agamanya saja yang paling benar sehingga jika menginginkan suatu perdamaian hanya bisa terjadi melalui jaminan agama tertentu saja. *Kedua* adalah strategi mengabaikan perbedaan. Strategi ini beranggapan bahwa kebenaran sudah ada pada setiap agama melalui caranya masing-masing maka perdamaian bisa terjadi jika kita mengabaikan perbedaan yang ada. *Ketiga* adalah strategi merangkul yang beranggapan bahwa hanya satu agama saja yang paling benar namun kebenaran ini sudah terpecah ke berbagai macam agama yang ada sehingga jika kita menginginkan perdamaian dunia maka kita harus merangkul semua agama dan mengintegrasikan menjadi satu. Namun Kung tidak setuju dengan ketiga strategi ini karena tidak bisa memecahkan persoalan yang muncul diantara agama yang ada. Maka ia menambahkan strategi keempat yaitu strategi ekumenisme. Hanya ada satu kriteria

⁵⁸ Luluk Fikri Zuhriyah, “Dakwah Inklusif Nurcholish Madjid”, 234

⁵⁹ Nurcholish Madjid, “Kerukunan Beragama” dalam *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog “Bebas” Konflik*, ed. Andito, (Pustaka Hidayah: Bandung, 1998), xx

⁶⁰ Akhmad Rizqon Khamami, *Dialog Antar-Iman Sebagai Resolusi Konflik*, Tawaran Mohammed Abu-Nimer, 250

kebenaran yaitu kemanusiaan (*humanum*) sehingga tugas dari semua agama adalah merumuskan bersama kriteria kemanusiaan tersebut.⁶¹

Membangun Perdamaian Secara Dialogis

Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, dialog Islam-Kristen dan antarumat beragama sudah jauh lebih berkembang dan mencakup isu-isu yang lebih luas. Pada 1998 sebuah proyek yang diinisiasi oleh James D. Wolfensohn, Presiden World Bank, dan Lord Carey, Uskup Agung Canterbury pada saat itu, serta pemuka-pemuka agama di dunia dibentuk dengan nama World Faiths Development Dialogue (WFDD).⁶² Membangun proses keberagaman yang dialogis dalam membina kerukunan antar umat beragama, mesti dipertimbangkan kesucian dan kehadiran agama-agama. Demikian juga memposisikan agama sebagai landasan pembangunan dan peradaban, merupakan prasyarat bagi sebuah masyarakat atau bangsa untuk melangkah pada bentuk negara maju yang lebih bermartabat, beradab, demokratis, toleran, adil, makmur dan berkarakter.⁶³

Sebagai seseorang yang beragama pastilah setiap orang mempunyai faham yang berbeda dengan orang yang bergama lain, penganut agama tersebut harus tetap pada pendiriannya masing-masing. Seseorang sebaiknya dalam memahami agamanya dengan baik dan menghormati keberadaan agama lain. Prinsip di atas harus dipegang teguh oleh semua umat beragama terutama yang beragama Islam, dan harus difahami dengan sebaik-baiknya, karena dengan pemahaman yang baik dan benar terhadap ajaran agama dapat menciptakan saling menghargai dan saling menghormati.⁶⁴

Menurut Nurcholish Madjid dalam suatu proses dialog, tujuannya tentu saja bukan untuk membuat suatu kesamaan pandangan, apalagi keseragaman, karena ini adalah sesuatu yang *absurd*. Dalam dialog ini dilakukan guna bertujuan untuk mendapatkan titik-titik pertemuan yang dimungkinkan secara teologis oleh agama kita sendiri, meskipun, tentu saja terbatas hanya kepada hal-hal prinsipil. Masing-masing agama, bahkan sesungguhnya masing-masing kelompok intern suatu agama tertentu sendiri, mempunyai idiomnya sendiri yang hanya berlaku secara intern.⁶⁵

Sebagai salah satu pakar perbandingan agama, Mukti Ali juga meletakkan kerangka kerukunan umat beragama yang sesuai dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika. Mukti Ali juga mengungkapkan dalam statemennya, yaitu:

“Hidup berdampingan antar pelbagai macam kelompok pemeluk agama dengan toleransi dan penuh kedamaian adalah sangat baik, tetapi hal itu belum dapat dikatakan sebagai dialog antar pelbagai kelompok agama. karena dialog sesungguhnya bukan hanya saling memberi informasi, mana yang sama dan mana berbeda, antara ajaran satu dengan yang lainnya. Dialog antar agama juga bukan merupakan suatu usaha agar orang yang berbicara menjadi yakin akan kepercayaannya, dan menjadikan orang lain mengubah agamanya kepada agama yang ia peluk. Dialog tidak dimaksudkan untuk konversi, yaitu untuk memasung orang lain supaya menerima kepercayaan yang ia yakini, sekalipun konversi semacam itu menggembirakan orang yang agamanya diikuti. Dialog antar agama bukanlah studi akademis terhadap agama agama, juga bukan merupakan usaha untuk menyatukan semua ajaran agama menjadi satu. Dialog

⁶¹ Hans Kung, *Global Responsibility: In Search of a New World Ethics*, (New York: Crossroad, 1991), 78-933

⁶² J. B. Banawiratma dan Zainal Abidin Baqir. etc, *Dialog Antar Agama*, 33

⁶³ Husna Amin, “Mewujudkan Perdamaian Agama Dalam Bingkai Dialog”, 3

⁶⁴ Darwis Muhdina, “Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Makassar”, 21

⁶⁵ Luluk Fikri Zuhriyah, “Dakwah Inklusif Nurcholish Madjid”, 237

antar agama juga bukan suatu usaha untuk membentuk agama baru yang dapat diterima oleh semua pihak. Dialog bukanlah berdebat adu argumentasi antara pelbagai kelompok pemeluk agama, hingga dengan demikian ada orang yang menang dan ada orang yang kalah. Dialog bukanlah usaha meminta pertanggungjawaban orang lain dalam menjalankan agamanya. Dialog bukan semua itu.”⁶⁶

Membangun keberagaman yang saling menyapa membutuhkan sikap keberagaman yang dialogis. Sikap keberagaman yang dialogis ini tidak akan terbentuk apabila tidak memahami agama sebagai sebuah ajaran yang menjunjung tinggi perdamaian agama-agama. Hal ini menunjukkan signifikansi pendekatan dialog inklusif dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama yang terjadi selama ini. Selama ini pendekatan yang digunakan masih bersifat *top down*, belum menggunakan model dialog yang bersifat *bottom up*, sehingga dialog inklusif bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi penyelenggaraan dialog antara umat beragama di masa depan, sekaligus menjadi alternatif bagi problem pluralitas agama. Pada dataran ini pesan perdamaian yang terkandung dalam agama memungkinkan untuk diwujudkan dalam kehidupan nyata.⁶⁷

Dialog seperti ini perlu dikembangkan dalam skala nasional yang melibatkan tokoh-tokoh seluruh komponen bangsa dan dari semua unsur dari daerah, suku, intelektual, dan agama. Dialog ditekankan pada upaya menumbuhkan kesadaran intrinsik bahwa kekerasan, konflik dan perang tidak pernah membuahkan nilai positif bagi siapa pun dan dalam aspek mana pun, dan tidak pernah ditolerir oleh agama apa pun dan rasa kemanusiaan universal yang hakiki

Menurut Leonard Swidler, dalam menciptakan hubungan yang harmonis di antara pemeluk agama, setidaknya terdapat sepuluh prinsip yang harus diperhatikan agar dialog inklusif antar umat beragama dapat terjalin dengan baik, damai dan harmonis: ⁶⁸ *Pertama*, adanya keinginan untuk belajar. Hal ini sebagai tujuan agar mengenal dan memperoleh pengetahuan yang luas tentang bermacam-macam agama-agama yang ada; *Kedua*, mengupayakan dialog dalam dua arah, dengan memandang secara adil antara agama yang dipeluk sendiri dengan yang dipeluk orang lain. Dalam proses dialog tidak diperkenankan hanya melalui satu sudut pandang saja, diperlukan sikap bijaksana serta tidak memihak pada satu agama yang dianut saja; *Ketiga*, kejujuran. Setiap pemeluk agama harus bersikap jujur terhadap urusan intern agamanya; *Keempat*, membuat perbandingan secara adil, antara afiliasi sikap beragama dengan doktrin keagamaan, misalnya meyakini bahwa setiap agama mengajarkan hal-hal yang mengarah kepada kebaikan bersama; *Kelima*, adanya identitas yang otentik. Dalam dialog setiap anggota diharuskan menggambarkan realitas yang sesungguhnya terjadi pada diri serta agamanya. Hal ini menjadi penting dalam menjaga keotentikan cara pandang masing-masing agama; *Keenam*, menghilangkan prasangka-prasangka buruk, demi menjaga hubungan harmonis antar umat beragama. Seperti visi dari dialog antara agama adalah bukan mendakwahkan agama, tetapi sebuah upaya mengenali dan menjalin komunikasi antar pemeluk agama; *Ketujuh*, adanya kesetaraan atau keseimbangan. Hal ini akan memberikan stimulus bahwa tiap agama memiliki kebajikannya masing-masing. Prinsip kesetaraan mengajarkan bahwa tiap pemeluk

⁶⁶ Luluk Fikri Zuhriyah, “Dakwah Inklusif Nurcholish Madjid”, 237

⁶⁷ Husna Amin, “Mewujudkan Perdamaian Agama Dalam Bingkai Dialog”, 3

⁶⁸ Hendra Sunandar, *Membumikan Dialog Agama-Agama*, Makalah Seminar disampaikan pada Seminar Dialog Agama pada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (Jakarta: FISIP, 2011), 5-6

agama tidak berhak untuk merasa paling benar dari agama lain; *Kedelapan*, adanya rasa saling percaya, hal ini berguna untuk menghapus prasangka-prasangka buruk atas agama lain; *Kesembilan*, sikap kritis terhadap tradisi sendiri; *Kesepuluh*, merasakan dari dalam. Poin terakhir inilah menjadi pokok dalam menumbuhkan kedamaian dan keharmonisan antar pemeluk agama dalam bingkai dialog inklusif. Poin terakhir ini disebut juga dengan “*passing over*”, sebuah upaya merasakan kesejukan dan kenyamanan dari agama lain di luar agama yang di anut. Prinsip ini merupakan bentuk tingkatan sikap keberagamaan yang paling tinggi dan paling jujur di antara tahapan-tahapan dialog antar iman.

Membangun proses keberagamaan yang dialogis diperlukan dengan adanya pertimbangan dalam dimensi metafisik dari makna kesucian dan kehadiran agama-agama. Meletakkan agama dalam satu bingkai dialog inklusif berarti memulai dengan melangkah pada bentuk kesadaran hidup yang damai, harmonis, terbuka, toleran, adil, dan berkarakter. Apabila dengan jalan dialog antar agama ini terwujud maka hal ini akan menjadi strategi untuk menciptakan perdamaian yang abadi dalam setiap agama.

Wujud aplikasi dialog untuk menuju perdamaian

Dialog antarumat beragama dalam tingkat nasional maupun internasional terjadi sekitar tahun 1960-an. Pada 1967 bentuk-bentuk dialog di Indonesia mulai tampak, meski sebenarnya saat itu lebih merupakan respons terhadap konflik. Abd A'la dalam bukunya “*Melampaui Dialog Agama*” menerangkan bahwa keinginan dalam menciptakan perdamaian antar umat beragama dalam konferensi *World Parliament of Religions* di Chicago semakin tampak pada tahun 1993. Dalam konferensi ini 6.500 anggota Majelis Perlemen Agama-agama Dunia hadir dan merumuskan suatu pernyataan yang berjudul *Global Ethics*. Dalam pernyataan *Global Ethics* disebutkan bahwa untuk menjadi manusia seutuhnya dalam spirit agama-agama besar dan tradisi etik berarti umat manusia seluruh dunia dalam kehidupan publik dan pribadi harus peduli terhadap sesamanya dan alam lingkungannya, siap membantu dan tidak melakukan suatu tindakan brutal yang merugikan banyak pihak. Setiap bangsa, ras, dan penganut agama hendaknya mengedepankan toleransi yang tinggi terhadap satu sama yang lain.⁶⁹

Era teknologi informasi juga mulai memberikan warna lain bagi metode dialog antar agama. Beberapa saat yang lalu muncul *Faithbook*, yang diluncurkan di *Facebook* dan merupakan gagasan sebuah organisasi Yahudi Inggris untuk mempertemukan orang dari berbagai latar belakang kepercayaan dan agama melalui internet. Uniknya, *Faithbook* yang bertujuan untuk memerangi ekstremisme keagamaan ini juga didukung oleh Muslim Institute London yang merupakan organisasi Muslim terkemuka di Inggris. Menurut Direktur Muslim Institute, Ghayasuddin Siddiqui: “Tanpa menghiraukan muatan budaya apa pun yang kita bawa, latar keyakinan yang kita ikuti, kita harus mengakui bahwa pencipta kita adalah sama apa pun kita menyebut-Nya.”

Forum lain yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) adalah Alliance of Civilizations yang didirikan pada 2005 atas inisiatif pemerintah Spanyol dan Turki. Tujuan dari lembaga tersebut adalah untuk memperbaiki pemahaman dan hubungan kerjasama antarumat manusia dari berbagai latar budaya dan agama, serta membantu memerangi kekuatan yang akan menimbulkan polarisasi dan ekstremitas.

Dalam buku *Dialog Antar Umat Beragama* oleh J.B. Banawiratma, Zainal Abidin Baqir dkk, upaya dialog yang telah diterapkan di Indonesia sejak sekitar tahun 1969 yang dilakukan dalam tiga kelompok: *pertama*, dialog yang disponsori oleh pemerintah, terutama

⁶⁹Abd A'la, *Melampaui Dialog Agama*, 11-12

Kementerian Agama yang memulai sejarah dialog di Indonesia, kemudian oleh kementerian Luar Negeri melalui diplomasi publiknya yang baru dimulai beberapa tahun yang lalu. *Kedua*, dialog yang difasilitasi lembaga masyarakat sipil. *Ketiga*, dialog yang dikembangkan di lembaga-lembaga akademis, khususnya pada tingkat pascasarjana, dan pengembangan studi agama yang memiliki implikasi pada dialog.⁷⁰

Dalam konteks isu penyebaran agama Musyawarah Antaragama dilaksanakan di Jakarta pada 30 November 1967 atas prakarsa pemerintah. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Menteri Agama, K.H.M. Dahlan, dan dihadiri oleh sekitar 20 tokoh Muslim, Protestan, dan Katolik. Dalam pidatonya, Soeharto menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan respons atas ketegangan dan konflik agama yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Lebih jauh dia memperingatkan bahwa tidak ada satu kelompok umat beragama pun yang boleh mengajak umat beragama lain untuk mengikuti agama mereka. Namun, pertemuan tersebut tidak dapat menghasilkan satu kesepakatan mengenai dakwah kepada penganut agama lain.⁷¹

Sejak itulah pemerintah, melalui Kementerian Agama, memperkenalkan peraturan tambahan mengenai hubungan antarumat beragama. Pada 1969, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri menandatangani Surat Keputusan Bersama (No. 01/BER/MDN-MAG/1969) mengenai pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh para pemeluknya. Peraturan tersebut didasari, antara lain, pemikiran bahwa pemerintah perlu menjaga kebebasan setiap warga untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Di antara peraturan yang penting adalah bahwa kepala daerah harus memonitor propaganda dan ibadah para pemeluk agama sehingga tidak terjadi konflik. Selain itu, kegiatan tersebut tidak boleh mengandung unsur intimidasi, penyuapan, pemaksaan, atau ancaman, dan tidak boleh mengganggu keamanan umum. SKB tersebut juga menegaskan bahwa pembangunan rumah ibadah apa pun harus mendapatkan izin dari gubernur propinsi atau pihak lain yang ditunjuk untuk mengatur masalah tersebut.⁷²

Konsep kerukunan yang dipahami dalam artian masing-masing pemeluk agama menghindari diri untuk *membujuk* penganut agama lain untuk masuk ke agamanya sendiri menjadi orientasi awal program dialog antarumat beragama zaman Orde Baru. Meski gagal di pertemuan awal, Menteri Agama K.H.M. Dahlan dan penggantinya terus mengupayakan pertemuan tokoh-tokoh agama, konsultasi, dan upaya lainnya. Konsep tersebut menjadi jelas dalam istilah yang digunakan oleh Menteri Agama Mukti Ali (1971-1978), yaitu *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan).⁷³

Pemerintah menciptakan sebuah sistem yang memungkinkan mereka untuk secara lebih mudah mengetahui suara resmi masyarakat agama tertentu melalui wadah-wadah perwakilan keagamaan yang ada, seperti MUI, KWI, dan PGI. Paradigma Orde Baru adalah persatuan dan kesatuan. Kebijakan dengan menitikberatkan pada kerukunan dengan membatasi ekspresi perbedaan dan menomersatukan *persatuan* demi pembangunan tersebut dilanjutkan oleh menteri-menteri Orde Baru setelah Mukti Ali.⁷⁴

⁷⁰ J. B. Banawiratma dan Zainal Abidin Baqir. etc, *Dialog Antar Agama*, ix

⁷¹ Sudjangi, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama: 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1995/1996), 43-52

⁷² Sudjangi dkk, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, edisi ketujuh (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Bergama, Balitbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), 102-105

⁷³ J. B. Banawiratma dan Zainal Abidin Baqir. etc, *Dialog Antar Agama*, 41

⁷⁴ *Ibid.*, 43

Setelah lebih dari tiga dasawarsa, di awal abad ke-21 ini, dialog antarumat beragama mulai menunjukkan motivasi baru. Pasca-Orde Baru, Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Bersama nomor 9/2006 dan nomor 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Peraturan Bersama tersebut dikeluarkan untuk membatalkan Surat Keputusan Bersama nomor: 01/BER/MDN-MAG/1969 yang telah dibahas sebelumnya karena, antara lain, masalah pendirian rumah ibadat dianggap menjadi salah satu sebab yang dapat mengganggu hubungan antarumat beragama.⁷⁵

Selain upaya yang resmi dilakukan oleh pemerintah, beberapa lembaga non pemerintah (NGO) berbasis agama (terutama Islam dan Kristen) dan nonagama mengambil inisiatif untuk dialog antarumat beragama. Institusi tersebut adalah Interfidei (Institute for Inter-Faith Dialogue in Indonesia) yang didirikan pada 1992 oleh beberapa tokoh, yaitu: Pdt Eka Dharmaputra (Ketua), Djohan Effendi dan Daniel Dakhidae (Wakil Ketua). Interfidei menggunakan pendekatan *religious dialogue as social critique* yang lebih menekankan pada pentingnya peran agama dalam mengembangkan nilai-nilai keadilan sosial dan demokrasi.⁷⁶

Kelompok lain yang mirip dengan Interfidei adalah MADIA (Masyarakat Dialog Antaragama). MADIA didirikan pada November 1995 setelah sebelumnya beberapa aktivis Muslim mengadakan kontak dengan para intelektual Kristen yang terlibat dalam Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Sejalan dengan Interfidei, ide-ide tentang dialog antarumat beragama yang dipromosikan oleh MADIA dipraktikkan dalam konteks mempromosikan keadilan. Lembaga itu juga beberapa kali membuat pernyataan terbuka untuk menyuarakan pentingnya toleransi dan kerjasama antarumat beragama. Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) didirikan di Yogyakarta oleh beberapa aktivis mahasiswa berlatar belakang pesantren pada akhir 1980-an. LKiS kemudian terlibat aktif dalam menyuarakan ide-ide Islam yang toleran dan membebaskan. Salah satu kegiatan lapangan yang mereka lakukan di awal pendiriannya, masalah Waduk Kedung Ombo, membawa LKiS dalam persoalan pluralisme. Kemudian, sejalan dengan munculnya upaya untuk mengubah kecenderungan dialog yang berorientasi pada kerukunan menjadi dialog untuk demokratisasi.⁷⁷

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) didirikan pada 2001, memiliki tujuan untuk mengupayakan dialog dan perdamaian antara berbagai penganut agama, terutama Muslim dan Kristiani. Pendirian lembaga tersebut juga dapat dipahami dalam konteks munculnya berbagai konflik yang melibatkan umat Muslim dan Kristiani, terutama sejak akhir 1990-an. ICRP diketuai oleh Djohan Effendi, dan mengadakan berbagai aktivitas di beberapa wilayah Indonesia yang difokuskan pada 3 aspek: dialog doktrinal, isu-isu sosial politik, dan bantuan kemanusiaan. ICRP memiliki visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, berkeadilan, setara, persaudaraan dalam pluralisme agama dan kepercayaan, dan penghormatan kepada martabat manusia. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, ICRP merasa penting untuk membantu penanganan berbagai masalah dalam hubungan antaragama, serta membantu pengembangan jaringan kerjasama antarlembaga maupun individu untuk penguatan pluralisme dan perdamaian. beberapa tokoh agama Indonesia juga terlibat aktif dalam organisasi dialog tingkat dunia,

⁷⁵ Maftuh Basuni, "Sambutan Menteri Agama RI," dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 (Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI, 2006), 2-3

⁷⁶ J. B. Banawiratma dan Zainal Abidin Baqir. etc, *Dialog Antar Agama*, 51

⁷⁷ Ibid., 54

termasuk T.B Simatupang yang pernah menjadi salah satu anggota *Central Executive Committee* dari WCC.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa NGO tersebut di atas dapat dikatakan cukup berhasil dalam berbagai level. Aktivitas yang mereka upayakan lebih menunjukkan kejujuran untuk terciptanya hubungan yang lebih baik antarumat beragama. Dialog antarumat beragama tidak hanya difokuskan pada pemahaman bersama atas doktrin-doktrin keagamaan, melainkan pada kerjasama umat beragama dalam mengembangkan keadilan. Dari uraian di atas juga tampak bahwa filosofi yang mendasari upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai LSM dalam dialog antarumat beragama sangat berbeda dari filosofi pemerintah, terutama pada masa Orde Baru. Dalam pemerintah Orde Baru lebih bertujuan untuk menciptakan hidup berdampingan antar pemeluk agama secara damai terutama setelah terjadi konflik, berbagai NGO tersebut lebih menekankan pentingnya pengembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dengan cara antisipatif dan preventif.

Salah satu kegiatan yang cukup penting adalah *Regional Interfaith Dialogue and Cooperation* yang dilakukan Kemenlu, sebuah forum sebagai tempat bertemunya negara-negara di kawasan regional Asia Pasifik dalam bidang dialog antaragama. Kegiatan yang melibatkan empat negara sebagai sponsor utama, yaitu Indonesia, Filipina, Australia, dan Selandia Baru ini, hingga 2008 telah mengadakan empat kali pertemuan. Pertemuan pertama diadakan di Yogyakarta pada 2004 dengan tema *Dialogue on Interfaith Cooperation: Community Building and Harmony*. Pertemuan itu menghasilkan rekomendasi untuk mendirikan International Center for Religious and Cultural Cooperation di Yogyakarta, yang diharapkan dapat menyediakan pendekatan unik untuk memajukan perdamaian dan stabilitas dunia. Pertemuan kedua mengambil tema *Cebu Dialogue on Regional Interfaith Cooperation for Peace, Development and Human Dignity* yang diadakan di Cebu, Filipina, pada 2006, dan dihadiri oleh 15 negara, yaitu seluruh negara ASEAN, beserta Australia, Selandia Baru, Papua New Guinea, Timor Leste, dan Fiji. Deklarasi Cebu menghasilkan kesepakatan perlunya perbaikan sistem dan kurikulum pendidikan; peningkatan dialog dan kerjasama/jejaring antara dunia pendidikan dan pemerintah, tokoh agama dan media.

Pertemuan ketiga dengan tema *Building Bridges* diadakan di Waitangi, Selandia Baru, pada 2007 dan menghasilkan *Waitangi Declaration and Plan of Action*. Selanjutnya, pertemuan keempat yaitu *Phnom Penh Dialogue 2008 on Interfaith Cooperation for Peace and Harmony* diadakan di Phnom Penh, Kamboja, pada 2008 dan menghasilkan *Deklarasi Phnom Penh*. Dalam Deklarasi Phnom Penh dihasilkan komitmen untuk menjalankan kerjasama dialog antariman; perdamaian sebagai prioritas utama; meningkatkan partisipasi dari kalangan pemuda dan perempuan; membagi contoh pengalaman sukses dalam bidang dialog dan kerjasama antaragama kepada masyarakat, serta mendorong pihak lain untuk berpartisipasi; dan kerjasama antariman dalam isu-isu penting di masyarakat.⁷⁸

Selain *Regional Interfaith Dialogue*, Indonesia, melalui Kemenlu, juga berinisiatif untuk mengadakan kegiatan dialog antaragama melalui beberapa forum regional, seperti melalui ASEM (*Asia-European Meeting*) dan APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*). Melalui ASEM, Indonesia mendorong diadakannya *ASEM Interfaith Dialogue*, sebuah kerjasama dialog antaragama yang diadakan oleh negaranegara Asia dan Eropa. Kegiatan *ASEM Interfaith dialogue* telah diadakan empat kali. Pada *ASEM Interfaith Dialogue* pertama di Bali pada 2005, tema yang diangkat adalah *Building Interfaith Harmony within the International Community* dengan tujuan meningkatkan rasa saling mengerti dan saling menghormati di antara semua kepercayaan dan agama, khususnya di Asia dan Eropa.

⁷⁸ J. B. Banawiratma dan Zainal Abidin Baqir. etc, *Dialog Antar Agama*, 107

Kesimpulan

Mengkaji mengenai perdamaian agama dalam lingkup dialog inklusif, merupakan salah satu jalan sehingga perdamaian antara umat beragama dapat diwujudkan. Jika dalam dialog antara agama dapat berjalan secara kontinu maka dialog inklusif dapat menjadi salah satu strategi untuk menciptakan perdamaian abadi agama. Dengan adanya dialog antar umat beragama semoga dapat menjadi salah satu alternatif pemikiran dalam menjembatani isu pluralitas dan berupaya mengungkap kembali makna agama sebagai sumber perdamaian abadi kehidupan antar umat beragama.⁷⁹ Dialog antarumat beragama dalam tingkat nasional maupun internasional terjadi sekitar tahun 1960-an. Pada 1967 bentuk-bentuk dialog di Indonesia mulai tampak, meski sebenarnya saat itu lebih merupakan respons terhadap konflik. Setelah lebih dari tiga dasawarsa, di awal abad ke-21 ini, dialog antarumat beragama mulai menunjukkan motivasi baru. Kegiatan dialog antaragama dalam diplomasi Indonesia di masa depan tampaknya akan tetap mendapat prioritas dari pemerintah Indonesia. Dikatakan oleh pihak Kemenlu bahwa kegiatan itu telah menjadi agenda utama dalam diplomasi Indonesia. Bahkan, dalam anggaran belanja Kemenlu 2009, Direktorat Diplomasi Publik menempatkan kegiatan dialog antaragama sebagai prioritas utama.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin. 1996. "Etika dan Dialog Antar Agama: Perspektif Islam", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 4 Vol IV.
- A'la, Abd. 2002. *Melampaui Dialog Agama*. Jakarta: Kompas.
- Alfred North, Whitehead. 1958. *Adventures of Ideas*. New York: The New American Library
- Ali, A. Mukti. 1992. "Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi", dalam *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda*, ed. Burhanuddin Daya dan Herman Leonard Beck. Jakarta: INIS.
- Amin, Husna. 2013. "Mewujudkan Perdamaian Agama Dalam Bingkai Dialog". *LAIN Ar-Raniry*. <https://www.academia.edu/15830768/>
- Arwalembun, Raimondus. Dialog Antaragama: Jalan Menuju Perdamaian Dunia (Sebuah Tinjauan Atas Pemikiran Alfred North Whitehead). http://www.academia.edu/33635743/Dialog_Antaragama_Jalan_Menuju_Perdamaian_Dunia,
- Banawiratma, J. B. Etc. 2010. *Dialog Antar Agama*. Bandung: Mizan
- Basuni, Maftuh. 2006. "Sambutan Menteri Agama RI," dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006. Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI
- Effendi, Djohan. 1985. *Dialog Antar-Agama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan dalam Agama dan Tantangan Zaman, Pilihan Artikel Prisma 1975-1984*. LP3ES: Jakarta.

⁷⁹ J. B. Banawiratma dan Zainal Abidin Baqir. etc, *Dialog Antar Agama*, 57

Forward, Martin. 2001. view point in dialogue, dalam A Short Introduction To Interreligious Dialogue. Oxford: Oneward

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perdamaian>

Khamami, Akhmad Rizqon. Mei 2014. "Dialog Antar-Iman Sebagai Resolusi Konflik, Tawaran Mohammed Abu-Nimer". *Al-Tabrir*. Vol. 14, No. 2

Kung, Hans. 1991. *Global Responsibility: In Search of a New World Ethics*. New York: Crossroad.

_____. 2007. *Islam, Past, Present and Future*. England: One World Publication.

Madjid, Nurcholish. 1998. "Kerukunan Beragama" dalam *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog "Bebas" Konflik*, ed. Andito. Pustaka Hidayah: Bandung

Muhdina, Darwis. 2015. "Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Makassar". *Jurnal Diskursus Islam*. Volume 3 Nomor 1.

Mukhibat. 2017. "Konstruksi Harmoni Keberagaman Masyarakat Pedesaan Berbasis Masjid". *Proceeding of Community Development*. Vol. 1

Nurhanisah Senin, Khadijah Mohd Khambali. 2012. "Citra Dialog Antara Agama dalam Perspektif Islam dan Kristian: Analisis Awal". *MALIM – SEA Journal of General Studies* 13

Rahman, Budi Munawar. 2010. *Argumen Islam untuk Pluralisem: Islam Progressif dan Perkembangan Diskursusnya*. Jakarta: Gramedia.

Rosyid, Moh. Februari 2013 "Harmoni Kehidupan Sosial Beda Agama dan Aliran di Kudus". *ADDIN*. Vol. 7, No. 1,

Sabri, Muhammad. 1997. *Filsafat Perennial: Perspektif Alternatif bagi Studi Agama dan Signifikansinya terhadap Kehidupan Beragama Di Indonesia*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalidjaga

Sudarminta, J. 1991. *Filsafat Proses: Sebuah Pengantar Sistematis filsafat Alfred North Whitehead*. Yogyakarta: Kanisius.

Sudjangi, dkk. 2003. *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*. edisi ketujuh. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Bergama, Balitbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI.

_____. 1995/1996. *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama: 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI

Sunandar, Hendra. 2011. *Membumikan Dialog Agama-Agama*, Makalah Seminar disampaikan pada Seminar Dialog Agama pada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik. Jakarta: FISIP.

Zainuddin, M. 2010. *Pluralisme Agama Pergulatan Dialogis Islam-Kristen Di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press.

Zuhriyah, Luluk Fikri. Desember 2012. “Dakwah Inklusif Nurcholish Madjid”, *Jurnal Komunikasi Islam*, Volume 02, Nomor 02